



WAKIL KETUA FRAKSI PARTAI NASDEM DWI CANDRA PUTRA Ujung Tombak dan Ujung Tombok, Sesuaikan Honor Pemangku Wilayah



Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra sejak awal menjabat anggota dewan tidak pernah lepas terhadap kepeduliannya atas pemangku wilayah. Hal ini karena para pemangku wilayah selama ini menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok.

Dwi Candra menjabarkan, honorarium bagi pemangku wilayah tahun ini mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 269 Tahun 2024 tentang Rincian Standar Barang Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2025. Di dalamnya terdapat penjabaran honor jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat. "Sejak tahun 2022 itu tidak pernah ada penyesuaian. Dalam aturan itu disebutkan misalnya, honor Ketua RW ialah Rp 300.000 per bulan per orang yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tetapi yang diterima faktanya Rp 300.000 per tiga bulan," urainya, Rabu (12/3).

Selain Ketua RW, honor jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat juga meliputi Ketua LPMK, Ketua Pengurus Kampung, Ketua RT, Ketua TK PKK tingkat kementren hingga tingkat kelurahan. Besaran honor jasa pelayanan itu pun bervariasi. Paling besar ialah Ketua LPMK yakni Rp 500.000 per bulan per orang, sedangkan terendah

YOGYA (KR) - Ketua TK PKK tingkat kelurahan sebesar Rp 150.000 per bulan per orang.

Ketua TK PKK tingkat kelurahan sebesar Rp 150.000 per bulan per orang.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya ini pun menjelaskan, pemangku wilayah khususnya RT dan RW hampir setiap hari berhadapan dengan warga. Berbagai program pemerintah tidak mungkin bisa berhasil jika tidak melibatkan para pengurus RT dan RW. "Apalagi pendataan sampah kemarin juga dititikberatkan melalui Ketua RT dan RW. Semua program pemerintah itu juga melibatkan RT dan RW, termasuk penyelenggaraan pemilu kemarin," tandasnya.

Oleh karena itu tingginya tingginya aktivitas dan tanggung jawab para pemangku wilayah tersebut, imbuh Dwi Candra, sudah sepatutnya pemerintah melakukan kajian atas honorarium. Terutama dengan mempertimbangkan ukuran kepantasan serta apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjadi mitra pembangunan di wilayah. Jika dinilai tidak memungkinkan menambah satuan honor dalam standar barang dan jasa, maka bisa melalui mekanisme lain seperti hibah, transport kegiatan maupun tanda jasa.

Apalagi peran para Ketua RT, RW serta aparaturnya wilayah lainnya cukup signifikan dalam mensukseskan program Hingga Jogja Mulia yang digaungkan Walikota dan Wakil Walikota Yogya,

Hasto Wardoyo dan Wawan Harwaman. "Sudah menjadi ujung tombak keberhasilan program pemerintah di wilayah, ya mbok jangan terus-terus menjadi ujung tombok juga. Kami akan memberikan dukungan ketika ada usulan terkait hal itu," terang Dwi Candra. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wadhan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005